



**MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

**PENDAPAT AKHIR PRESIDEN
ATAS
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2003
TENTANG BADAN USAHA MILIK NEGARA**

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Salam sejahtera bagi kita semua,

Shalom,

Om Swastiastu,

Namo Buddhaya,

Salam Kebajikan,

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas kuasa, rahmat dan karunia-Nya, pada hari ini kita dapat hadir dalam Rapat Paripurna Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

Sebagaimana diketahui bersama bahwa revisi undang undang ini telah dilaksanakan sejak tahun 2023, dan setelah memakan waktu yang cukup lama, alhamdulillah telah diselesaikan pembahasannya dalam Pembicaraan Tingkat I, dengan keputusan menyetujui untuk diteruskan ke tahap selanjutnya yaitu Pembicaraan Tingkat II untuk mengambil keputusan dalam Rapat Paripurna DPR-RI.

Dalam kesempatan yang berbahagia ini, perkenankan kami mewakili Presiden untuk menyampaikan Pendapat Akhir Presiden atas Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.



**MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

**Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang Terhormat,
Hadirin dan sidang yang kami muliakan,**

Kami mewakili Bapak Presiden Republik Indonesia Jenderal TNI (Purn.) H. Prabowo Subianto yang memiliki visi yang sangat besar untuk Indonesia. Pada kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan visi dan arah kebijakan Pemerintah, terkait Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam rangka mewujudkan Indonesia yang maju dan berdaya saing global.

Kami memandang BUMN sebagai aset strategis negara memiliki peran vital dalam pembangunan ekonomi nasional. Untuk itu, BUMN harus terus ditransformasikan menjadi entitas bisnis yang profesional, efisien, dan berdaya saing global antara lain dengan melakukan restrukturisasi, reorganisasi, konsolidasi dan langkah-langkah lainnya untuk kemudian dapat menciptakan entitas yang lebih ramping, fokus, dan memberikan nilai tambah. Selain itu, BUMN juga perlu terus mengimplementasikan tata kelola korporasi yang baik (*Good Corporate Governance*), pengembangan sumber daya manusia unggul yang berintegritas dan berwawasan global, dan terus melakukan akselerasi inovasi dan penguasaan teknologi untuk meningkatkan produktivitas.

Selain daripada itu didalam RUU BUMN yang telah disetujui bersama antara Pemerintah dan DPR – RI pada tingkat 1 juga adalah pendirian Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara, atau BPI Danantara yang akan melakukan pengelolaan BUMN baik secara operasional maupun didalam mengoptimalkan pengelolaan deviden dalam rangka membantu Pemerintah dalam mewujudkan target pertumbuhan ekonomi 8% yang telah dicanangkan Pemerintah yang dipimpin Bapak Presiden Republik Indonesia Jenderal TNI (Purn.) H. Prabowo Subianto.

**Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang Terhormat,
Hadirin dan sidang yang kami muliakan,**

Transformasi BUMN melalui pembentukan BPI Danantara merupakan langkah strategis dalam mewujudkan visi Bersama Indonesia Maju Menuju



**MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

Indonesia Emas 2045. Melalui sinergi antara pemerintah, BUMN, dan seluruh pemangku kepentingan, kita yakin dapat membangun fondasi ekonomi yang kokoh dan berkelanjutan bagi generasi mendatang.

Untuk itu, berdasarkan penjelasan – penjelasan yang telah kami sampaikan di atas, Pemerintah mendukung inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat dalam melakukan perubahan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

**Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang Terhormat,
Hadirin dan sidang yang kami muliakan,**

Dalam perkembangannya, beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, telah dilakukan untuk dapat senantiasa mengakselerasi persaingan BUMN.

Beberapa pokok materi penting dalam RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, antara lain;

- a. Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara secara resmi didirikan dan dibentuk dalam rangka melakukan konsolidasi pengelolaan BUMN serta optimalisasi pengelolaan dividen dan investasi.
- b. Penegasan terkait pengelolaan aset BUMN sesuai prinsip tata kelola perusahaan yang baik dilakukan secara akuntabel dan sesuai peraturan perundang-undangan;
- c. Pengaturan tentang sumber daya manusia (SDM) BUMN untuk memberi peluang bagi penyandang disabilitas dan masyarakat setempat sesuai aturan. Pekerja perempuan diberi peluang untuk menduduki posisi jabatan direksi, dewan komisaris atau jabatan strategis lain di BUMN; dan
- d. Penegasan status kekayaan BUMN sebagai kekayaan negara yang dipisahkan agar lebih lincah untuk menjalankan aksi korporasi.



**MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

Beberapa pengaturan tersebut, dan pengaturan-pengaturan lainnya di dalam Perubahan Ketiga RUU BUMN ini Diharapkan dapat semakin memperkuat daya saing BUMN dan mendukung target pertumbuhan ekonomi Indonesia, sebagaimana yang telah dicanangkan oleh Presiden RI saat ini.

**Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang Terhormat,
Hadirin dan sidang yang kami muliakan,**

Berdasarkan hal tersebut di atas dan setelah mempertimbangkan secara sungguh-sungguh persetujuan Fraksi-Fraksi, izinkanlah kami mewakili Bapak Presiden Republik Indonesia Jenderal TNI (Purn.) H. Prabowo Subianto dalam Rapat Tingkat II Paripurna ini, dengan mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Pemerintah menyatakan mendukung Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara untuk disahkan menjadi Undang Undang.

Pada akhirnya, kami mewakili Presiden menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Pimpinan dan Anggota DPR-RI yang terhormat yang dengan penuh dedikasi, kerja keras, pemikiran, perhatian, dan kerjasama dapat menyelesaikan pembahasan RUU tersebut.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

**ATAS NAMA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

ERICK THOHIR